

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap negara di dunia, khususnya bagi Indonesia. Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir dari suatu negara. Berbagai ide dan konsep tentang kemiskinan telah dipelajari dan diadaptasi di berbagai negara berkembang, tetapi dengan pandangan yang tidak memuaskan. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara berkembang masih menderita kemiskinan. Menurut Maipita (2013), beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekurangan antara lain perkembangan ekonomi regional dan global yang rendah, pendidikan dan penguasaan teknologi yang buruk, sumber daya alam yang terbatas, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, Stabilitas politik.

Kemiskinan tidak bisa diukur hanya dengan satu indikator. Kemiskinan bukan hanya sekedar pendapatan dan pengeluaran sehari-hari orang dan keluarga. Kemiskinan memiliki arti dan aspek yang luas. Kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga jenis. Kemiskinan absolut (pendapatan dan konsumsi), kemiskinan relatif (fasilitas umum), kemiskinan sosial (Kahn, 2016). Kemiskinan yang biasa dikenal dengan istilah kemiskinan absolut, atau kemiskinan dengan pendekatan pendapatan/pendapatan, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kegagalan individu untuk memenuhi standar pendapatan minimal yang telah ditetapkan.

Kemiskinan bisa dilihat dari dua sisi, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep

kemiskinan yang mengacu pada harta benda yang terkait dengan standar hidup seseorang atau keluarga. Kedua istilah tersebut merujuk pada perbedaan sosial (social distings) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya, pada kemiskinan absolut besarnya telah ditentukan terlebih dahulu dengan angka riil (garis kemiskinan) dan/atau indikator atau kriteria yang digunakan, sedangkan pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan relatif antar penduduk.

Kemiskinan absolut atau absolute mengacu pada standar hidup minimum masyarakat, yang dinyatakan dalam bentuk garis kemiskinan yang konstan, tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi masyarakat. Kemiskinan relatif, di sisi lain, pada dasarnya mengacu pada perbedaan relatif dalam tingkat kesejahteraan antara kelompok orang. Kemiskinan didefinisikan sebagai persentil terendah dari kemiskinan di masyarakat. Dalam kategori-kategori ini, orang-orang yang tergolong miskin mungkin dapat memenuhi hak-hak dasar mereka, tetapi tingkat pemenuhannya berada pada tingkat yang paling rendah, dan kemiskinan relatif adalah kemiskinan dalam hal ketidaksetaraan di antara kelompok-kelompok penduduk.

Penyelenggaraan pemerintah desa dalam penyelenggaraan dana desa didasarkan pada konsep otonomi, yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara eksklusif oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat berkewajiban untuk secara mandiri menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan dengan tujuan memberikan kesempatan dan melibatkan masyarakat desa secara langsung dalam pembangunan. Membantu masyarakat

pedesaan meningkatkan kinerja ekonomi mereka dan keluar dari kemiskinan. Partisipasi masyarakat dan pemantauan penggunaan dana desa ditujukan untuk mencapai tujuan pendanaan desa yaitu mencapai desa mandiri (Arfiansyah, 2020).

Pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Banyak software yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya di pedesaan, seperti UU Desa No. 6 Tahun 2014. Undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada desa untuk mengelola kawasan, dan selain alokasi dana desa (ADDs), hibah desa dan dana retribusi/pajak, kinerja desa untuk mendukung pembangunan. sebuah dana. Pendanaan desa diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan transformasi ekonomi setiap desa. Kewajiban setiap desa memiliki unit ekonomi desa (bumdes) bertujuan agar desa mandiri secara ekonomi dan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Angka kemiskinan di Sumatera Utara (Sumatera Utara) secara umum berfluktuasi dalam jumlah dan proporsi dari Maret 2009 hingga Maret 2021. Hal itu berdasarkan statistics yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Fungsi Statistik Sosial-BPS Sumut, Anggaran Taulina, Sumut. Seperti yang dijelaskan, ada dua fase pasang surut yang terjadi. Fase pertama Maret 2009 mengalami tren penurunan hingga Maret 2014 dan kemudian meningkat hingga Maret 2017. Fase kedua menurun dari September 2017 hingga September 2019 dan pulih dari Maret 2020 hingga Maret 2021. Tahap pertama,

khususnya kenaikan angka kemiskinan pada September 2013, September 2014-September 2015, disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan harga minyak tanah. Peningkatan jumlah dan proporsi penduduk miskin tahap kedua dari Maret 2020 hingga Maret 2021 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Data ini menunjukkan bahwa antara kota dan desa tidak setara, pemerintah negara berkembang terus mengadopsi berbagai program untuk membantu orang keluar dari kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Dana Desa merupakan salah satu sarana yang digunakan pemerintah untuk melakukan pengelolaan Dana Desa (DD). Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembangunan desa.

Kampung KB merupakan miniatur yang melaksanakan application KB secara komprehensif dan terpadu di tingkat lapangan (Desa/Kelurahan/dusun/RT/RW). Konsep Kampung KB merupakan konsep terpadu antara application KB dan application pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Desa KB dirancang sebagai upaya agar masyarakat dapat mengelola application KB. Kegiatannya dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Tentu saja, tujuan akhirnya adalah pengembangan masyarakat itu sendiri. Negara hanya merangsang dan mendukung, selebihnya tanggung jawab masyarakat. Yaitu melalui upaya menjadikan Desa KB sebagai

program yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat oleh masyarakat seperti Desa Bagan Serdang yang merupakan bagian dari Desa KB.

Desa Bagan Serdang merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Deli Serdang, provinsi Sumatera Utara. Masyarakat desa Bagan Serdang terdiri atas tiga dusun, dimana dusun I berjumlah 606 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 185 KK. Dusun II berjumlah 500 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 145 KK, sedangkan dusun III berjumlah 489 jiwa dengan Jumlah Kepala Keluarga 130 KK. Adapun data penduduk masyarakat desa Bagan Serdang berdasarkan pekerjaan yaitu : (1) Nelayan berjumlah 397 KK, (2) Petani berjumlah 8 KK, (3) Pegawai Negeri Sipil berjumlah 5 KK, (4) Pedagang berjumlah 17 KK, (5) Wiraswasta berjumlah 40 KK, (6) Buruh berjumlah 30 KK, (7) Peternak berjumlah 20 KK. Dari data tersebut dapat kita lihat mayoritas pekerjaan dari masyarakat desa Bagan Serdang adalah Nelayan. Desa Bagan serdang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dimana penduduk Desa Bagan Serdang didominasi oleh Pra Sekolah. Dilihat dari pada lokasi Desa Bagan Serdang yang dikategorikan dengan lingkungan yang tidak terawat.

Kemiskinan masyarakat pesisir bersifat multi dimensi dan di sebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat antara lain kebutuhan akan pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur, jumlah penduduk, program KB, kemiskinan, pangan bidang, stanting, keterampilan, gotong royong. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas tersebut, bagi peneliti tertarik untuk mengamati proses perencanaan, palaksanaa, laporan keuangan Desa dengan Prosedur yang berlaku , dari sini peneliti akan melaksanakan penelelitian dengan

judul, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung KB Bagan Serdang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Isu-isu berikut dapat diidentifikasi dari beberapa penjelasan yang diberikan di latar belakang yaitu :

1. Tingkat Pendidikan masyarakat di Desa Bagan Serdang relative rendah didominasi oleh tamatan SD hal ini disebabkan beraneka ragam anak yang mengalami Putus sekolah dan memilih untuk bekerja sebagai pencuci kapal para Nelayan serta mereka juga kesulitan untuk bersekolah karena lokasi Tempat tinggal dengan sekolah jauh.
2. Pekerjaan Penduduk di dominasi oleh Nelayan dengan pendapatan tidak menetap dengan penghasilan kurang lebih perhari Rp.40.000
3. Infrastruktur tidak terpenuhi secara maksimal di Desa Bagan Serdang sepertipada bagian Kesehatan yang ada hanya Puskesmas yang peralatannya tidak semaksimalatau belum selengkap di Puskesmas dan bidang kesehatan lainnya.
4. Di desa Bagan Serdang jumlah penduduknya padat sehingga tidak sesuai dengan lapangan Pekerjaan atau Potensi mata pencaharian di desa tersebut.
5. Keikutsertaan masyarakat dalam Program KB rendah sehingga mengakibatkan banyak anak yang terlahir kurang Gizi
6. Jumlah Masyarakat yang miskin atau Pra sejahtera banyak ditemui di Desa Bagan Serdang hal ini diakibatkan sumber Penghasilan Masyarakat yang kurang.

7. Desa Bagan Serdang termasuk desa yang kumuh dikarenakan banyak ditemuin pekarangan yang kotor sehingga jika musim hujan maka akan terjadi Kebanjiran di Desa tersebut.
8. Tingkat Balita Stunting(Gizi Buruk) Masih tinggi dimana pada 2020 ditemukan 7 dari 10 anak mengalami stunting
9. Keterampilan Masyarakat yang masih belum maksimal dalam mengelola hasil bumi yang terkandung di Desa Tersebut
10. Pada Desa Bagan Serdang tingkat solidaritas dan partisipasi masyarakat masih sangat rendah hal ini dapat dilihat dari banyak tempat umum atau pekarangan desa yang sangat tidak terawat.

1.3. Batasan Masalah

Agar permasalahan tidak melebar, bahwa penelitian memberikan pembatasan pada masalah yang dikaji. Dalam batasan masalah, penelitian memfokuskan masalah pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.

1.4. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di kampung KB Bagan Serdang Kecamatan Pantai Lagu Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apa faktor-faktor penyebab dari kemiskinan di kampung KB Bagan Serdang ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tentu saja, setiap penelitian memiliki tujuan yang mendasari mengapa penelitian itu dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui Bagaimana pengelolaan dana desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di kampung KB Bagan Serdang Kecamatan Pantai Lagu Kabupaten Deli Serdang
2. Mengetahui faktor-faktor dari kemiskinan di kampung KB Bagan Serdang

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna :

1. Manfaat teoretis
 - a. sebagai upaya desa KB Bagan Serdang Mengelola dana desa dalam mengentaskan kemiskinan di desa,
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dan bermanfaat secara umum dan khususnya sebagai bahan masukan bagi penelitian sosial dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat mempertimbangkan penelitian serupa, yaitu yang terkait dengan pendanaan desa dan pengentasan kemiskinan.

2. manfaat praktis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan di desa KB Bagan Serdang.
- b. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan penilaian terhadap peran pemerintah dalam mengelola dana desa, dengan contoh dari Indonesia dan lain-lain tentang bagaimana dana desa dapat digunakan untuk upaya penanggulangan kemiskinan dapat menawarkan kepada desa.
- c. Ini dapat memberikan ide untuk penelitian lebih lanjut tentang pendanaan desa dan upaya pengentasan kemiskinan.